



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerima daerah terdiri dari: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Kaswara, 2000). Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Bapenda harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar dalam system pemerintah Negara.

Kota Tangerang Selatan adalah daerah yang senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk lebih tepatnya dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2016

Tahun	Bapenda Tangerang Selatan
2014	397.132.248.027
2015	448.833.333.392
2016	441.116.295.313

Realisasi Bapenda selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan Bapenda tersebut, mengindikasikan bahwa potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Walaupun Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya meningkat, dari hasil persentase mencerminkan tersebut timbul Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai penempatan 16 jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah, yang terdiri dari 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota. Secara rinci dapat di lihat dalam table berikut.

Tabel 1 2. Jenis-jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Ditetapkannya Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah, khususnya untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

mengenai perubahan dari pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota, yang selama ini porsi 64% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasilan menjadi 100% akan menambah secara signifikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Alasan di ubahnya pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pusat ke daerah yaitu diharapkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan akan menjadi salah satu sumber Badan Pendapatan Daerah yang cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah selama ini. Di samping itu menurut teori pajak properti internasional yang selama ini di pakai oleh para pengagas Undang-undang ini adalah bahwa pajak propertii cenderung lebih bersifat lokal. Fisibilitas dan immobilitasnya menjadi salah satu alasan penting mengapa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan lebih cenderung menjadi pajak daerah. Apalagi jika di kaitkan dengan kemandirian keuangan pemerintah daerahserta mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Visualisasi Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) di Bapenda Tahun 2014-2016"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Bagaimana hasil perbandingan pertahun berdasarkan indikator pembayaran BPHTB pada setiap Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ?
2. Bagaimana cara memvisualisasikan pembayaran BPHTB yang ada di Kota Tangerang Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memberikan batasan masalah agar dalam penjelasannya nanti akan lebih mudah, terarah, dan sesuai dengan yang diharapkan serta terorganisir dengan baik. Pembuatan skripsi ini dibatasi hanya pada masalah sebagai berikut.

- a) Data masukan dari Bapenda Tangerang Selatan.
- b) Data yang digunakan hanya tiga tahun terakhir, 2014 – 2016.
- c) Penelitian ini hanya mencakup analisa dan untuk tahap implementasi tidak dilakukan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan, sebagai berikut:

- a) Menampilkan informasi pemetaan persebaran Kelurahan dari Kota Tangerang Selatan untuk mengetahui pembayaran BPHTB di tahun 2014-2016.
- b) Dapat menggunakan dan menerapkan metode *User Centered Design (UCD)* dalam pembuatan penelitian ini.

1.5 Timeline Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Berikut rinciannya berdasarkan per-minggu :

Tabel 1.3 Timeline Penelitian

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perancangan dan pengajuan prososal	■													
<i>Collecting Data</i>		■												
Melakukan analisa data			■	■										
<i>Cleanising Data</i>					■	■	■	■	■	■	■	■		
<i>Input Data ke Tableau</i>												■		
<i>Design Dashboard Visualization</i>													■	■
<i>Publish Visualization Data</i>														■

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab yang secara sistematis akan menjelaskan setiap langkah yang diambil oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian pemetaan penyebaran Kecamatan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori yang akan digunakan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu pembuatan Visualisasi Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tangerang Selatan di tahun 2014-2016.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian, desain penelitian, perbandingan aplikasi membuat *Dashboard* yang digunakan dan metode penelitian, teknik pengambilan data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Bab ini menjelaskan pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode *User Centered Design*. Adapun hasil analisa pada bab IV meliputi analisa masalah, dan hasil sebelum adanya *Dashboard* ini dan sesudahnya (*before-after*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisikan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian, desain penelitian, perbandingan aplikasi membuat *Dashboard* yang digunakan dan metode penelitian, teknik pengambilan data.

UMN